Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page 31696-31709

Tata Kelola Dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia: Analisis Kritis dari Perspektif Hukum Administrasi Negara

Wike Putri Meilia[1], Aldri Frinaldi[2], Roberia[3],Angga Putra Tri Rezeki[4]
[1,2,3,4] Universitas Negeri Padang
e-mail: meiliawikeputri@gmail.com

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk pada anak. Namun, implementasinya menghadapi tantangan dalam tata kelola dan pengawasan dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Penelitian kualitatif berbasis studi literatur ini bertujuan menganalisis secara kritis kelemahan tata kelola HAN dalam mekanisme pengawasan MBG serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Hasil kajian menunjukkan tiga masalah mendasar, yaitu kerangka hukum dan kelembagaan yang lemah, mekanisme pengawasan yang tidak terintegrasi, serta minimnya transparansi dan partisipasi publik. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas program, meningkatnya risiko fiskal, dan pelanggaran hak warga negara atas pelayanan publik yang aman dan akuntabel. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan lima langkah perbaikan komprehensif: penguatan landasan hukum, penataan kelembagaan, integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi, penegakan sanksi yang konsisten, serta peningkatan partisipasi publik dan transparansi. Kesimpulannya, reformasi sistemik berbasis prinsip-prinsip administrasi negara yang baik sangat diperlukan agar MBG dapat berjalan efektif dan tepat sasaran

Kata kunci: hukum administrasi negara, tata kelola, program makan bergizi gratis

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a strategic policy of the Indonesian government to address the issues of stunting and malnutrition in children. However, its implementation faces failures in governance and oversight from the perspective of State Administrative Law. This qualitative research based on literature review aims to critically analyze the weaknesses of State Administrative Law governance in the MBG oversight mechanism and formulate recommendations for improvement. The results of the study reveal three fundamental problems, namely a weak legal and institutional framework, an unintegrated oversight mechanism, and a lack of transparency and public participation. These conditions have implications for the program's low effectiveness, increased fiscal risk, and violations of citizens' rights to safe and accountable public services. Based on these findings, this study recommends five comprehensive improvement measures: strengthening the legal basis, restructuring institutions, integrating technology-based monitoring systems, enforcing consistent sanctions, and increasing public participation and transparency. In conclusion, systemic reforms based on the principles of good state administration are essential for the MBG to run effectively and achieve its objectives.

Keywords: public administration law, governance, free nutritious meal program

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tata kelola Hukum Administrasi Negara yang baik berfokus pada pelaksanaan administrasi public yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu,

tata kelola tersebut harus mampu menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip ini sangat krusial karena adanya dinamika politik dan sosial yang kompleks, serta meningkatnya tuntutan masyarakat agar pelayanan publik lebih berkualitas dan fokus pada penyediaan hak-hak warga negara.(Arianti & Deviani, 2024). Dengan adanya tata kelola yang baik menunjukkan adanya hubungan yang saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat. ini menekankan pentingnya pengelolaan yang terbuka, di mana pemerintah menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Indonesia memang menghadapi tantangan besar terkait masalah stunting dan gizi buruk. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Meski tren ini menunjukkan kemajuan, target nasional sebesar 14,2% pada 2029 masih cukup jauh untuk dicapai. Dalam situasi ini, MBG hadir sebagai kebijakan ambisius yang diharapkan bisa mempercepat pengurangan stunting Menanggapi hal ini, pemerintah menginisiasi MBG sebagai solusi yang masuk akal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan MBG di Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan serius, baik dalam pelaksanaan maupun mekanisme pengawasannya, khususnya yang terkait dengan tata kelola. Data empiris menunjukkan bahwa sejak program ini mulai dijalankan pada kuartal pertama, lebih dari lima kasus keracunan massal telah terjadi di sejumlah sekolah dan berdampak pada ratusan siswa dalam kurun waktu yang berdekatan. BBC Indonesia bahkan melaporkan bahwa beberapa kasus mengakibatkan anak-anak harus menjalani perawatan di rumah sakit serta mengalami trauma berkepanjangan (Emmanulle et al., 2025). Temuan ini menggambarkan bahwa adanya kelemahan struktural dalam penyelenggaraan program masih menjadi persoalan mendesak untuk segera ditangani. Salah satu hambatan utama terlihat dari lemahnya koordinasi antarlembaga. Tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Daerah membuat garis komando menjadi kabur dan berdampak langsung pada efektivitas pengawasan. Situasi ini menyebabkan pelaksanaan MBG tidak konsisten di berbagai daerah serta menghambat proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang (Kusuma & Firmansyah, 2024). Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran MBG juga masih belum memadai. Proses pengadaan bahan pangan dan penyaluran dana sering kali tidak melalui mekanisme pengawasan yang memadai. Beberapa temuan lapangan memperlihatkan adanya dugaan mark-up harga serta penyediaan makanan yang tidak sesuai standar, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan dan korupsi (Auryn et al., 2024). Bahkan, sejumlah laporan menyebutkan bahwa alokasi anggaran tidak selalu tepat sasaran, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip administrasi negara yang baik (Krosby et al., 2024). Permasalahan ini semakin diperburuk oleh terbatasnya kapasitas aparat pengawas, baik internal maupun eksternal. Banyak inspektorat daerah yang kekurangan sumber daya manusia dan sarana pendukung, sehingga tidak mampu melakukan pengawasan

secara menyeluruh. Partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi bagian dari pengawasan pun belum berjalan optimal, sehingga akuntabilitas dan transparansi yang dikehendaki oleh kerangka hukum administrasi negara belum sepenuhnya terwujud (Kusuma & Firmansyah, 2024; Krosby et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas lembaga pengawas melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya terkait Standard Operating Procedures (SOP) di seluruh tingkatan administrasi (Maryam, 2023). Selain keterbatasan kapasitas pengawas, belum adanya SOP yang seragam di seluruh Indonesia juga menjadi persoalan penting. Perbedaan mekanisme pelaksanaan MBG antarwilayah menyulitkan proses monitoring dan evaluasi secara terpadu. Karena itu, dibutuhkan SOP nasional yang jelas agar seluruh pihak memiliki pedoman yang sama sehingga praktik pelaksanaan lebih terstandarisasi dan hasil program dapat lebih optimal (Maryam, 2023; Subarjo et al., 2023). Penerapan prinsip good governance dan hukum administrasi negara yang baik menuntut dipenuhinya sejumlah kriteria penting. Pertama adalah memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat. Setiap proses administratif harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari tingkat perundang-undangan hingga ketentuan teknis di daerah. Kepastian hukum ini diperlukan untuk menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki pedoman yang jelas, sebagaimana dijelaskan oleh (Budiati et al., 2020) bahwa tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi dalam pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa pelayanan publik harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku (Ammas et al., 2023). Sistem pengawasan yang kuat dan saling terhubung juga diperlukan untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan program. Pengawasan internal yang dilakukan aparat pengawas fungsional pemerintah (APFP) harus berjalan berdampingan dengan fungsi pengawasan legislatif, seperti DPRD, serta melibatkan masyarakat. (Farina et al., 2023) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan yang ketat dapat menekan risiko penyalahgunaan sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, mekanisme pengawasan terpadu akan memastikan bahwa informasi mengenai program dapat diakses secara layak oleh semua pihak (Beshi & Kaur, 2019). Selain itu Diperlukan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas agar setiap tindakan dalam penyelenggaraan program dapat ditinjau dan dinilai secara tepat. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka sanksi administratif, perdata, maupun pidana harus diberlakukan secara tegas dan konsisten. Hidayat juga menegaskan bahwa akuntabilitas yang efektif harus disertai transparansi pada seluruh proses pengelolaan keuangan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Said et al., 2024).

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian pertama Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. (Zulaika et al., 2025). Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan MBG masih terganggu oleh ketidaksiapan regulasi, koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah, serta kurangnya SOP yang

jelas. Akuntabilitas anggaran juga belum optimal karena sistem pelaporan dan pengawasan belum terintegrasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan penggunaan dana. Kedua Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara. (Riyanto & Sinaga, 2025). Kajian ini menunjukkan bahwa kasus keracunan dalam program MBG mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi hak anak atas makanan yang aman. Lemahnya kualitas pengawasan, standar keamanan pangan, dan kontrol penyedia makanan menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya insiden tersebut. Ketiga Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kesenjangan Akses pada Sekolah Nonformal: Studi Kasus PKBM dalam Program Paket A. (Achmad et al., 2025). Penelitian ini menemukan bahwa peserta didik di PKBM belum mendapatkan akses MBG secara setara karena program lebih difokuskan pada sekolah formal. Ketidakjelasan data, mekanisme pendataan, dan kebijakan yang tidak inklusif menyebabkan anak di pendidikan nonformal tertinggal sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan penelaahan terhadap tiga penelitian terdahulu mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terlihat bahwa kajian-kajian tersebut sudah membahas isu implementasi, akuntabilitas anggaran, pemenuhan hak anak, serta ketimpangan akses. Namun, secara akademik masih terdapat gap penelitian yang penting, yakni belum adanya kajian yang menelaah secara mendalam dan kritis bagaimana mekanisme tata kelola serta sistem pengawasan MBG dijalankan apabila ditinjau secara khusus dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN). Untuk itu peneliti tertarik meneliti dengan judul Tata Kelola Dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia: Analisis Kritis Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai teknik utama pengumpulan data. Studi literatur, sebagaimana dijelaskan oleh Sarwono, merupakan proses penelusuran dan pengkajian berbagai referensi, seperti buku dan hasil penelitian sebelumnya, untuk memperoleh landasan teori yang relevan dengan topik yang diteliti. Creswell (dalam Habsy et al., 2023) juga menegaskan bahwa studi literatur adalah rangkuman tertulis yang memuat artikel jurnal, buku, serta dokumen lain yang menyajikan perkembangan pengetahuan masa lalu dan masa kini yang disusun berdasarkan kebutuhan dan fokus kajian. Dalam konteks penelitian ini, studi literatur digunakan untuk menghimpun berbagai sumber terkait tata kelola hukum administrasi negara, prinsip pengawasan publik, akuntabilitas, serta dinamika implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pertama, menelusuri dan memilih literatur yang berhubungan dengan pengawasan administrasi pemerintahan, AUPB, akuntabilitas publik, dan tata kelola program

sosial. Kedua, mengevaluasi kualitas setiap sumber berdasarkan relevansi, tingkat kredibilitas, serta kontribusinya terhadap pembahasan pengawasan MBG. Ketiga, mengintegrasikan temuan untuk memetakan persoalan tata kelola, pola kelemahan pengawasan, potensi maladministrasi, serta tantangan administratif yang muncul dalam implementasi MBG. Keempat, menyusun kesimpulan yang memberikan penilaian kritis mengenai bagaimana tata kelola hukum administrasi negara saat ini mempengaruhi efektivitas pengawasan MBG dan apa implikasinya bagi perbaikan kebijakan ke depan.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam literatur, sekaligus memberikan pemahaman dan interpretasi menyeluruh terkait isu tata kelola dan pengawasan program publik (Habsy et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis literatur mengenai tata kelola Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), ditemukan tiga permasalahan utama yang muncul secara konsisten, yaitu: (1) kerangka hukum dan kelembagaan yang belum sinkron, (2) mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang terfragmentasi, dan (3) rendahnya transparansi dan partisipasi publik. Ketiga isu tersebut berdampak pada menurunnya efektivitas program dan belum optimalnya pemenuhan hak masyarakat.

Kerangka Hukum dan Kelembagaan yang Lemah

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG belum ditopang oleh standar operasional prosedur (SOP) nasional yang bersifat mengikat, sehingga implementasi program berbeda antar daerah. Ketidaksinkronan regulasi dan tumpang tindih kewenangan antar instansi mengakibatkan ketidakjelasan struktur komando, lambannya pengambilan keputusan, serta hambatan penyelesaian masalah ketika terjadi insiden seperti keracunan massal (Beal et al., 2018; Rachmi et al., 2016; Nugraheni et al., 2023). Kondisi ini sejalan dengan temuan Rezeki & Frinaldi (2024; 2025) yang menegaskan bahwa disharmonisasi regulasi di tingkat daerah memperlemah kapasitas tata kelola, terutama pada sektor layanan publik dan pangan.

Mekanisme Pengawasan Tidak Terintegrasi

Pengawasan internal melalui Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) tidak terhubung secara efektif dengan pengawasan eksternal oleh DPRD, Ombudsman, dan BPK, sehingga menghasilkan rekomendasi yang parsial (Ukhra et al., 2024). Rendahnya kapasitas pengawas daerah serta lemahnya penegakan sanksi memperbesar risiko terjadinya penyimpangan, inefisiensi, mark-up anggaran, hingga praktik korupsi (Hamułka et al., 2018; Malsagova et al., 2024; Listiningrum et al., 2021; Nasution & Erlina,

2019). Studi Frinaldi et al. (2024) menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak berbasis digital turut memperlebar celah maladministrasi.

Selain itu, penelitian mengenai pengelolaan sanitasi dan sampah berbasis masyarakat menunjukkan bahwa lemahnya sistem monitoring dapat menurunkan kualitas program (Frinaldi et al., 2024; Mubarak et al., 2024; Frinaldi et al., 2025). Hal ini relevan dengan konteks MBG yang memerlukan sistem kontrol terstandar.

Transparansi dan Partisipasi Publik Minim

Akses informasi terkait MBG, seperti rincian anggaran, daftar penerima manfaat, standar gizi, dan hasil audit masih sangat terbatas (Fahrudin et al., 2024; Habibullah et al., 2022; Aldean et al., 2022). Partisipasi publik cenderung bersifat prosedural dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Megayanti et al., 2022; Vidyanti et al., 2020). Penelitian komunitas seperti Rezeki et al. (2023) menunjukkan bahwa interaksi sosial yang aktif merupakan fondasi penting bagi terciptanya partisipasi substantif, namun kondisi ini belum tampak dalam pelaksanaan MBG.

Dampak terhadap Efektivitas Program dan Hak Warga Negara

Kelemahan regulasi, pengawasan, dan partisipasi publik berimplikasi pada rendahnya capaian program dalam menurunkan stunting, meningkatnya risiko fiskal, serta terjadinya pelanggaran hak atas pelayanan publik yang aman dan berkualitas (Nugraheni et al., 2023; Rachmi et al., 2016; Tawai et al., 2021). Dalam konteks HAN, hal ini merefleksikan ketidakpatuhan terhadap prinsip pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan responsif.

Pembahasan:

Keterkaitan Antar Masalah Tata Kelola

Temuan menunjukkan bahwa lemahnya kerangka hukum merupakan akar dari berbagai persoalan turunan dalam tata kelola MBG. Ketidakjelasan regulasi memicu koordinasi kelembagaan yang tidak efektif serta pengawasan yang tidak terintegrasi. Leke et al. (2022) menegaskan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat hanya dapat berjalan jika ditopang oleh kerangka hukum dan kelembagaan yang selaras.

Minimnya transparansi dan akuntabilitas memperkuat patologi birokrasi seperti ketidakjelasan tanggung jawab dan praktik koruptif (Purwaningsih & Asriati, 2024; Natasyah, 2023). Kondisi ini serupa dengan temuan Rezeki et al. (2025) mengenai hubungan pemerintah–warga yang rentan konflik ketika mekanisme administratif tidak berjalan sesuai asas kepastian hukum.

Konsekuensi terhadap Efektivitas Program dan Hak Konstitusional

Ketiadaan SOP nasional menyebabkan kualitas makanan tidak seragam dan rentan menimbulkan risiko kesehatan. Lemahnya pengawasan membuka peluang kecurangan seperti mark-up anggaran (Izzati

& Firmansyah, 2023). Hal ini mengancam pemenuhan hak anak atas gizi serta hak publik atas pelayanan yang akuntabel. Penelitian terkait ketahanan pangan (Rezeki & Frinaldi, 2024) juga menunjukkan bahwa kepastian regulasi merupakan faktor penting dalam perlindungan hak warga.

Tinjauan Teoretis dalam Perspektif HAN

Dalam perspektif HAN, masalah MBG menunjukkan pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Analisis Pelaksanaan MBG terhadap Asas-Asas HAN

Asas HAN	Temuan Pelaksanaan MBG
Kepastian Hukum	Regulasi tidak sinkron, SOP tidak seragam
Akuntabilitas	Pengawasan tidak terintegrasi, sanksi lemah
Transparansi	Akses informasi terbatas
Partisipasi	Keterlibatan publik bersifat formalitas

Literatur menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi akan melemahkan efektivitas penyelenggaraan kebijakan publik (Lobubun et al., 2022; Situmorang & Triadi, 2024).

Urgensi Perbaikan Sistemik

Berbagai studi menekankan perlunya perbaikan regulasi untuk memperkuat koordinasi kelembagaan (Gamar & Djamhuri, 2015; Putri et al., 2024). Transformasi digital dianggap mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan transparansi (Frinaldi et al., 2024; Rini, 2016). Penegakan sanksi yang konsisten juga dapat meminimalkan penyimpangan (Rahayu et al., 2019). Hal ini sejalan dengan rekomendasi penelitian mengenai tata kelola lingkungan dan pengelolaan limbah berbasis komunitas (Mubarak et al., 2024; Frinaldi et al., 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar utama perbaikan tata Kelola yakni regulasi, teknologi, penegakan hukum, dan partisipasi komunitas tidak boleh dipandang sebagai solusi yang terisolasi. keempat elemen ini membentuk suatu ekosistem tata kelola yang integratif dan saling menguatkan. Regulasi yang diperkuat menciptakan koridor hukum bagi koordinasi kelembagaan; transformasi digital memberikan alat dan platform untuk membuat koordinasi tersebut efisien dan transparan, sanksi yang konsisten menjamin kepatuhan dan menghadirkan efek deterren; sementara pendekatan berbasis komunitas memastikan bahwa seluruh mekanisme ini tetap berpijak pada konteks lokal, diterima secara sosial, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan ke depan hendaknya tidak memilih salah satu, namun mendorong implementasi yang holistik dan simultan. Sinergi antara kerangka formal (regulasi dan sanksi) dengan pendorong teknis (digital) dan modal sosial (komunitas) inilah yang akan menciptakan tata kelola yang tidak hanya efektif di atas kertas, tetapi juga tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Perbaikan Tata Kelola

1. Memperkuat Landasan Hukum

Memperkuat landasan hukum menjadi langkah mendasar dalam memastikan efektivitas Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi, penyusunan SOP nasional yang seragam, serta kejelasan pembagian kewenangan antarlembaga agar implementasi tidak tumpang tindih (Zhao et al., 2020). Selain itu, penguatan kerangka regulasi perlu berorientasi pada prinsip kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam temuan Rezeki dan Frinaldi (2025). Kejelasan hukum yang kokoh akan memberikan arah yang lebih pasti dan mengurangi potensi konflik kewenangan di lapangan.

2. Menata Ulang Kelembagaan

Penataan ulang kelembagaan diperlukan untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif dalam penyelenggaraan program MBG. Langkah ini mencakup penetapan kementerian tertentu sebagai *leading sector* yang memiliki mandat koordinatif yang kuat serta pembagian tugas yang jelas (Bhowmik & Das, 2017). Selain itu, integrasi lintas sektor perlu dikembangkan dengan mencontoh praktik baik pada program sanitasi dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah berhasil menunjukkan efektivitas kolaborasi antarlembaga (Frinaldi et al., 2024; Mubarak et al., 2024). Dengan demikian, institusi terkait dapat bekerja dalam satu kerangka kerja yang sinergis.

3. Mengintegrasikan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi

Integrasi pengawasan berbasis teknologi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pemantauan pelaksanaan program MBG. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT), penyediaan data terintegrasi, serta penggunaan pengawasan *real-time* akan memperkuat mekanisme kontrol di semua level. Langkah ini dapat mengikuti model transformasi digital dalam administrasi pemerintahan yang telah terbukti meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas birokrasi (Frinaldi et al., 2024). Dengan dukungan teknologi, potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani secara tepat.

4. Menegakkan Sanksi Administratif dan Perdata Secara Konsisten

Penegakan sanksi administratif dan perdata secara konsisten merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas pelaksanaan program. Mekanisme seperti *blacklist* penyedia yang melanggar aturan, pengajuan gugatan perdata atas kerugian negara, serta penerapan mitigasi risiko harus dijalankan secara tegas (Chen et al., 2023). Kebijakan ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga meningkatkan kepatuhan penyedia dan pelaksana program. Konsistensi penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan program MBG.

5. Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik

Peningkatan transparansi dan partisipasi publik menjadi pilar penting dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel. Pengembangan portal data terbuka, penyediaan kanal pengaduan publik, serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain dapat memperkuat akurasi dan keamanan data (González-Mendes et al., 2024). Selain itu, pelibatan masyarakat secara substantif perlu diperluas dengan mengadaptasi konsep pengelolaan lingkungan berbasis komunitas yang telah terbukti efektif dalam mendorong kolaborasi akar rumput (Frinaldi et al., 2025). Dengan keterlibatan publik yang lebih luas, pengawasan sosial terhadap program dapat berjalan lebih optimal.

KESIMPULAN

Dari kajian kritis ini dapat disimpulkan tata kelola Program MBG masih menunjukkan kelemahan signifikan dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas. Akar masalahnya bersifat sistemik: regulasi yang belum selaras, struktur kelembagaan yang tumpang tindih, serta mekanisme pengawasan yang tidak terintegrasi. Kurangnya transparansi dan partisipasi publik semakin memperbesar peluang terjadinya maladministrasi, inefisiensi, dan bahkan korupsi, yang tampak pada kasus-kasus keracunan massal maupun pemborosan anggaran.

Dampak dari kondisi tata kelola ini sangat luas. Secara program, tujuan penurunan stunting terancam tidak tercapai; dari sisi fiskal, negara menghadapi risiko kebocoran anggaran; dan secara hukum, hak warga negara atas pelayanan publik yang aman, terbuka, dan bertanggung jawab tidak terpenuhi. Situasi ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh yang terencana dan terintegrasi. Rekomendasi kebijakan seperti harmonisasi regulasi, penataan ulang struktur kelembagaan, pengawasan berbasis teknologi, penegakan sanksi, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik menjadi langkah penting untuk membawa Program MBG lebih sesuai dengan prinsip good governance. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, Program MBG dapat benar-benar menjadi instrumen efektif untuk menurunkan stunting dan memenuhi hak gizi anak Indonesia.

Keterbatasan utama penelitian ini adalah pendekatan kualitatifnya yang bertumpu sepenuhnya pada studi literatur, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum diverifikasi melalui data empiris primer mengenai implementasi serta dinamika pengawasan Program MBG di berbagai konteks daerah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk mengadopsi metode campuran (*mixed-methods*) dengan melakukan studi lapangan secara mendalam guna menguji secara empiris

efektivitas model pengawasan terintegrasi berbasis teknologi dan partisipasi publik, sekaligus menganalisis faktor penghambat dan pendorongnya dalam kerangka hukum administrasi negara yang spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Reviews in Pharmacy, 11w(6), 1069–1074. https://doi.org/10.31838/srp.2020.6.152

Achmad, I. A., Emirati, E., & Basra, J. (2025). Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dan Kesenjangan Akses Pada Sekolah Nonformal: Studi Kasus PKBM Dalam Program Paket A. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa Dan Akademisi , 1(4), 24–32. https://jurnal.yayasanmeisyarainsanmadani.com/index.php/intelektual/article/view/318

Aldean, M. Y., Paradise, P., & Nugraha, N. A. S. (2022). Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Vaksinasi Covid-19 Di Twitter Menggunakan Metode Random Forest Classifier (Studi Kasus: Vaksin Sinovac). Journal of Informatics Information System Software Engineering and Applications (Inista), 4(2), 64–72. https://doi.org/10.20895/inista.v4i2.575

Ammas, S., Hasran, H., Hasran, B., & Fitriani, A. (2023). Patologi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan Di Takalar. Journal of Government Insight, 3(1), 295–304. https://doi.org/10.47030/jgi.v3i1.628

Arianti, D. Y., & Deviani, D. (2024). Pengaruh Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat: Suatu Persepsi Dari Masyarakat Di Kecamatan Pantai Cermin. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 6(1), 17–28. https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1143

Auryn, S., Agushybana, F., & Widjanarko, B. (2024). Gambaran Prinsip Good Governance Dalam Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Care Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan, 12(1), 181–194. https://doi.org/10.33366/jc.v12i1.4945

Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A Review of Child Stunting Determinants in <scp>Indonesia</Scp>. Maternal and Child Nutrition, 14(4). https://doi.org/10.1111/mcn.12617

Beshi, T. D., & Kaur, R. (2019). Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. Public Organization Review, 20(2), 337–350. https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6

Bhowmik, K. R., & Das, S. (2017). On Exploring and Ranking Risk Factors of Child Malnutrition in Bangladesh Using Multiple Classification Analysis. BMC Nutrition, 3(1). https://doi.org/10.1186/s40795-017-0194-7

Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 3(4), 425–444. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127

Chen, Y., Zhao, S., Xu, Y., Cai, M., & Zhang, G. (2023). SARS-CoV-2 Transmission via Maritime Cold Chains: A Statistical Analysis of Nucleic Acid Detection Results of Cold Chain Food Imported From Fuzhou Ports. Heliyon, 9(11), e21954. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21954

Emmanulle, K. F. V., Saputra, R. A., Wicaksono, A. S. P. Y. W., Wicaksana, D. P., & Kamal, U. (2025). Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam TinjauanHukum Kemasyarkatan dan Aspek Negara Berkembang. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1(4), 1329–1342. https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/534

Fahrudin, A., Andayani, R. H. R., Albert, W. K. G., Hindarsah, I., Hakim, M. Z., & Yusuf, H. (2024). The Impact of Social Protection on Community Resilience in the Context of Climate Change and Natural Disaster. Journal of Ecohumanism, 3(8). https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4824

Farina, L., Ekananda, M., & Fatimah, F. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Yang Dimediasi Komitmen Organisasi. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 9(3), 308–315. https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.384

Gamar, N., & Djamhuri, A. (2015). Auditor Internal Sebagai "Dokter" Fraud Di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.009

González-Mendes, S., Alonso-Muñoz, S., Muiña, F. E. G., & Sánchez, R. G. (2024). Discovering the Conceptual Building Blocks of Blockchain Technology Applications in the Agri-Food Supply Chain: A Review and Research Agenda. British Food Journal, 126(13), 182–206. https://doi.org/10.1108/bfj-06-2023-0517

Hamulka, J., Wądołowska, L., Hoffmann, M., Kowalkowska, J., & Gutkowska, K. (2018). Effect of an Education Program on Nutrition Knowledge, Attitudes Toward Nutrition, Diet Quality, Lifestyle, and Body Composition in Polish Teenagers. The ABC of Healthy Eating Project: Design, Protocol, and Methodology. Nutrients, 10(10), 1439. https://doi.org/10.3390/nu10101439

Izzati, A. K., & Firmansyah, A. (2023). Fraud Diamond Theory, Efektivitas Belanja Pemerintah Dan Komitmen Organisasi. Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi, 23(1), 65–90. https://doi.org/10.25105/mraai.v23i1.15845

Krosby, S. S., Rahmi, S. A., & Mintasrihardi, M. (2024). BahasImplementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kota Matarama Indonesia. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta Stia Mataram, 10(1), 29–43. https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i1.618

Kusuma, M. H., & Firmansyah, A. (2024). Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP Untuk Optimalisasi Pencegahan Korupsi Di Indonesia. Jurnalku, 4(4), 433–446. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i4.1183

Leke, A. A. C. M., Irawati, R. I., & Candradewini, C. (2022). Analisis Lingkungan Pengendalian Dalam Pelaksanaan SPIP Di Inspektorat Kabulaten Nagekeo. Owner, 6(1), 136–146. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.540

Listiningrum, P., Firdaus, R. S., Annamalia, Q., & Mayarana, A. (2021). Optimasi Regulasi, Fasilitas, Dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius Di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(3), 202–219. https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17631

Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 294–322. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322

Maryam, N. S. (2023). Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bidang Pertanahan Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Bandung. Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(1), 45–54. https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.3113

Megayanti, I. G. P. L., Ani, L. S., & Sari, K. A. K. (2022). The Differences of Dietary Habits and the Incidence of Anemia in the Preconception Period in Mountainous With Coastal Area. E-Jurnal Medika Udayana, 11(8), 79. https://doi.org/10.24843/mu.2022.v11.i8.p15

natasyah, N. a. (2023). Patologi Dalam Birokrasi. https://doi.org/10.31219/osf.io/9ajp3

Nugraheni, W. P., Mahmudiono, T., Faisal, D. R., Purwatiningsih, Y., Lestyoningrum, S. D., Yulianti, A., Nainggolan, O., & Abihail, C. T. (2023). Poor and Uneducated Parents Increased the Risk of Stunting Among Children Living in Non-Remote Areas of Indonesia. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2537611/v1

Purwaningsih, D., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Sumber Daya. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (Jppi), 4(4), 1723–1732. https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757

Putri, F. R., Utami, F. A., & Nasir, L. A. (2024). Analisis Fraud Pada Laporan Keuangan Perusahaan Perkebunan. Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 4(1), 2499–2510. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5412

Rini, R. (2016). Penerapan Internet Financial Reporting Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7022

Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANAN AMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI

GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA. Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM Dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2, 167–186.

Said, R. W., Saputra, A., & Ruhana, F. (2024). Organisasi Dan Manajemen Pemerintah Sebagai Fungsi Strategis Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah. Jurnal Ilmiah Global Education, 5(2), 1391–1399. https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2832

Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkat, Independensi, Dan Kualitas. JCL, 1(2), 9. https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429

SSGI. (2025). Survei Status Gizi Indonesia.

Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., Guzman, B. M. N. De, & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian Covid-19 Issue on Media: Review on Spiral of Silence Application Theory. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 5(2), 286–301. https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3758

Ukhra, G., Kholid, M. N., & Salsabilla, S. (2024). Accounting Students' Perspectives on the Factors That Determine Their Career as Government Auditors. Jurnal Proaksi, 11(1), 19–29. https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5301

Vidyanti, A. N., Hardhantyo, M., Wiratama, B. S., Prodjohardjono, A., & Hu, C. (2020). Obesity Is Less Frequently Associated With Cognitive Impairment in Elderly Individuals: A Cross-Sectional Study in Yogyakarta, Indonesia. Nutrients, 12(2), 367. https://doi.org/10.3390/nu12020367

Zhao, X., Li, Y., Ge, Y., Shi, Y., Lv, P., Zhang, J., Gui, F., Zhou, Y., Jiang, K., Lin, N., Bai, T., Jin, R., Wu, Y., Yang, X., & Li, X. (2020). Evaluation of Nutrition Risk and Its Association With Mortality Risk in Severely and Critically Ill COVID-19 Patients. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 45(1), 32–42. https://doi.org/10.1002/jpen.1953

Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 01(03), 426–435.

Frinaldi, A., Mubarak, A., Rezeki, A. P. T., Rista, M., Helmi, R. F., & Wilis, R. (2024, December). Analysis of community-based sanitation implementation in Pariaman City. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1414, No. 1, p. 012081). IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1414/1/012081

Rezeki, A. P. T., & Frinaldi, A. (2024). Strategi pemerintahan daerah Kota Padang Panjang dalam menjaga keberlanjutan lahan dan pangan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 12(2), 204–214. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i2.250

Rezeki, A. P. T., & Frinaldi, A. (2025). The dynamics of the relationship between government and citizens from the perspective of administrative court decisions: Dinamika hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam perspektif Keputusan Tata Usaha Negara. Santhet (Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah). https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/5687

Frinaldi, A., Afdalisma, A., Rezeki, A. P. T., & Saputra, B. (2024, November). Digital transformation of government administration: Analysis of efficiency, transparency, and challenges in Indonesia. In IAPA Proceedings Conference (pp. 82–101). https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1096

Mubarak, A., Frinaldi, A., Syamsir, Syolendra, D. F., Fitriyanti, W., & Rezeki, A. P. T. (2024). Community involvement in the development of nagari-based sustainable waste management. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1414(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1414/1/012082

Rezeki, T., Putra, A., Pratiwi, L. P., Handriyani, R., & Rinaldo, A. (2023). Peranan interaksi sosial dalam meningkatkan pemahaman budaya antar mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang. Journal of Comprehensive Science (JCS), 2(7).

https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.432

Putra, A., Rezeki, T., Fitrisia, A., & Fatimah, S. (2025). Transformasi taksonomi Ilmu Administrasi Negara dalam merespons environmental informatics di era digital. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9, 13993–14000. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27453/18611

Frinaldi, A., Mubarak, A., Renaldi, I., Saputra, B., Rezeki, A. P. T., Afdalisma, & Syolendra, D. F. (2025). Developing local initiatives for waste management: a community empowerment approach in sungai batang village, maninjau. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1556(1), 12077. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1556/1/012077